

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) adalah istilah yang merujuk pada wanita yang menjadi kepala rumah tangga karena suaminya meninggal, bercerai, atau tidak berada di rumah. Pada tahun 2004, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara resmi mengakui istilah PEKKA dan memandangnya sebagai sebuah konsep yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2010)

Tujuan utama dari gerakan PEKKA adalah meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan pendampingan pengorganisasian perempuan di tingkat keluarga dan komunitas. Gerakan ini juga berfokus pada upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengembangan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. (Situmorang, M., & Mawarti, N. (2015).

Ada beberapa program utama yang dijalankan oleh PEKKA, adalah Pertama : Penguatan Organisasi Keluarga Pra Sejahtera (KPS) PEKKA membantu para perempuan kepala keluarga untuk membangun organisasi dan jaringan yang kuat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan

kemandirian KPS dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan kekerasan dalam rumah tangga; Kedua : Pemberdayaan Ekonomi Keluarga PEKKA memberikan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai bidang ekonomi, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan jasa. Dalam hal ini PEKKA berusaha mengembangkan kapasitas para perempuan kepala keluarga agar dapat mengelola usaha ekonomi secara mandiri dan berdaya saing; Ketiga : Pendidikan dan Pelatihan PEKKA memberikan akses pendidikan dan pelatihan bagi anggota Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Program ini meliputi pendidikan formal, non-formal dan kecakapan hidup (life skill). Dalam hal ini PEKKA berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi anak-anak KPS; Empat: Perlindungan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga PEKKA memberikan bantuan dan dukungan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anggota Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Program ini meliputi pendampingan hukum, konseling dan pendampingan psikososial. (Wulandari, N. (2019).

Perempuan dapat menjadi kepala keluarga karena berbagai alasan yang kompleks, baik karena keadaan yang tidak terduga seperti kematian atau perpisahan dengan suami, atau karena pilihan untuk memimpin keluarga sebagai bentuk kemandirian ekonomi dan sosial. Menurut World Bank, pada tahun 2020, sekitar 30% keluarga di seluruh dunia dipimpin oleh perempuan. Beberapa faktor yang memengaruhi perempuan menjadi kepala keluarga adalah kematian atau perpisahan dengan suami, adanya ketidakadilan gender dalam

sistem hukum atau ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adelliana et al. (2021) di Indonesia, sekitar 45% dari 150 responden yang menjadi kepala keluarga perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan mereka harus bercerai atau meninggalkan suami.

Perempuan yang menjadi kepala keluarga (PEKKA) sering menghadapi berbagai hambatan, kendala, dan masalah dalam menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga, diantaranya :

Masalah ekonomi dan keuangan, PEKKA cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan ekonomi karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka tanpa bantuan finansial dari suami. PEKKA juga memiliki akses yang terbatas terhadap pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang layak. Tantangan dalam mengasuh anak, PEKKA sering harus menghadapi tantangan dalam mengasuh anak-anak mereka karena mereka harus mengambil peran ganda sebagai ibu dan ayah. Selain itu, PEKKA juga memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, Diskriminasi dan stereotip gender, PEKKA sering menghadapi diskriminasi dan stereotip gender dalam keluarga dan masyarakat, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan peran kepala keluarga dengan efektif. PEKKA juga dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, Tantangan dalam mengambil keputusan, PEKKA sering harus mengambil keputusan penting dalam keluarga tanpa dukungan atau konsultasi dari pasangan. Hal ini dapat menjadi beban mental dan emosional

yang besar, Tantangan dalam memimpin keluarga, PEKKA harus memimpin keluarga mereka tanpa dukungan dari suami, yang dapat menjadi tantangan besar dalam mengatasi konflik dan mengambil keputusan penting. (International Labour Organization. (2019).

Fenomena Program PEKKA di Indonesia saat ini adalah keberhasilannya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial perempuan di Indonesia, serta memberikan dukungan dan perlindungan terhadap perempuan yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Menurut laporan terbaru dari Yayasan PEKKA (2021), terdapat beberapa program PEKKA yang sedang berjalan saat ini adalah, Program Penguatan Kepemimpinan Perempuan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kepemimpinan perempuan dalam mengorganisir kelompok-kelompok PEKKA di tingkat lokal dan nasional. Program ini telah berhasil melahirkan banyak perempuan pemimpin yang berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan keluarga, Program Perlindungan Anak: Program ini bertujuan untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, serta memberikan dukungan kepada anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan. Program ini melibatkan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak, Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Program ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan institusi pemerintah, dalam

membangun kesadaran dan melakukan tindakan preventif terhadap kekerasan, Program Penguatan Kemandirian Ekonomi Perempuan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan akses ke pembiayaan. Program ini telah berhasil membantu banyak perempuan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, PEKKA juga telah berhasil mengembangkan program-program inovatif seperti program wirausaha dan program pembiayaan mikro, yang bertujuan untuk membantu perempuan dalam mengembangkan usaha mikro dan memperoleh akses ke pembiayaan. Program-program inovatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di Indonesia. (Kusnanto, H. (2019).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) RI mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 37.87 juta jiwa atau sekitar 18.41%, dan jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13%. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2020, secara keseluruhan ada 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan yang artinya 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Mayoritas dari perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, hidup di bawah garis kemiskinan. (BPS,2020)

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi fokus kerja PEKKA adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Flores Timur. PEKKA telah

melakukan berbagai program dan kegiatan di Flores Timur, NTT untuk meningkatkan kesejahteraan PKK dan keluarga mereka. PEKKA juga melakukan kampanye dan advokasi untuk memperkuat hak-hak perempuan kepala keluarga di Flores Timur, NTT. PEKKA bekerja sama dengan pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan akses perempuan kepala keluarga ke layanan publik dan dukungan social. PEKKA (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di berbagai aspek kehidupan. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Dasar-dasar PEKKA dan pemerintahan terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan dalam pembangunan. Berikut adalah beberapa dasar PEKKA dan pemerintahan yang mendasari program tersebut: Pertama, Konstitusi: Dasar PEKKA dan pemerintahan terdapat dalam konstitusi negara, yang menetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara serta prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Kedua, Pembangunan Berkelanjutan: PEKKA dan pemerintahan berpegang pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ketiga, Pemberdayaan

Masyarakat: PEKKA dan pemerintahan berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan. Pemberdayaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pemantauan hasilnya. Keempat, Keadilan dan Kesetaraan: PEKKA dan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan mendapatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk hidup yang layak. Kelima, Transparansi dan Akuntabilitas: PEKKA dan pemerintahan yang baik mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Hal ini melibatkan penerapan tata kelola yang baik, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan program. Keenam, Kolaborasi dan Kemitraan: PEKKA dan pemerintahan berusaha untuk membangun kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga. Melalui kerjasama ini, berbagai pihak dapat saling mendukung dan memanfaatkan keahlian serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama.

Dasar-dasar ini menjadi panduan dalam merancang dan melaksanakan program PEKKA serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.

LKBN (Lembaga Kantor Berita Nasiona) Antara pada bulan November 2019, disebutkan bahwa Kelurahan Kelubagolit merupakan salah satu daerah di Kabupaten Flores Timur yang mengimplementasikan program PEKKA. Program PEKKA di Kelurahan Kelubagolit diketahui telah memberikan dampak positif terhadap perempuan kepala keluarga dan keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu contoh keberhasilan program PEKKA di Kecamatan Kelubagolit adalah berhasilnya sejumlah perempuan kepala keluarga untuk membuka usaha kecil dan menengah (UKM) seperti pembuatan kerupuk dan kerajinan tangan.

Namun, terdapat juga beberapa kendala umum yang dihadapi dalam implementasi program PEKKA di Kecamatan Kelubagolit yaitu; Satu, sumber daya terbatas, program-program seperti PEKKA seringkali membutuhkan sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur yang memadai untuk berhasil. Jika sumber daya ini terbatas, implementasi program bisa menjadi sulit. Kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kesuksesan program PEKKA seringkali tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengadopsi dan menerapkan program tersebut. Jika masyarakat sepenuhnya tidak menyadari manfaatnya atau tidak berpartisipasi secara aktif, program mungkin tidak memberikan hasil yang diharapkan. Ketiga, Faktor budaya dan social, setiap wilayah memiliki konteks social yang unik. Beberapa aspek budaya dan social ini yang mungkin menjadi hambatan dalam implementasi program, misalnya, tradisi, norma, atau ketidaksetaraan gender yang dapat mempengaruhi partisipasi atau aksesibilitas. Keempat, koordinasi dan kolaborasi

antar Lembaga. Program PEKKA mungkin melibatkan berbagai Lembaga dan pihak terkait dalam implementasinya kurangnya koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama antar Lembaga dapat menyulitkan implementasi program dan mempengaruhi kelancarannya. Kelima, monitoring dan evaluasi yang tidak memadai, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengukue keberhasilan program, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Kurangnya system monitoring dan evaluasi yang efektif dapat menyulitkan pemantauan dan peningkatan program. Adapu permasalahan konteks yang dihadapi oleh para anggota PEKKA di Kecamatan Kelubagolit adalah keterbatasan sumber daya dimana Kecamatan Kelubagolit memeiliki keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan sarana pendukung lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program PEKKA, terutama dalam memberikan dukungan yang memadai kepada perempuan yang menjadi sasaran program.

Berdasarkan beberapa uraian diatas dan beberapa asumsi serta masalah yang menarik, sehinggah penulis memilih judul **”STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG EKONOMI MELALUI PROGRAM ”PEKKA” DI KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR’**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Apa saja program Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan perempuan di Kecamatan Kelubagolit?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan dan pendampingan Perempuan Kepala Keluarga dalam mencapai Kesejahteraan yang dilaksanakan di Kecamatan Kelubagolit?
3. Apa saja Kendala Yang dihadapi Kelompok Pemberdayaan Perempuan kepala keluarga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan di Kecamatan kelubagolit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk Mengetahui Program Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan perempuan di Kecamatan Kelubagolit.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan dan pendampingan Perempuan Kepala Keluarga dalam mencapai Kesejahteraan yang dilaksanakan di Kecamatan Kelubagolit.
3. Untuk Mengetahui Apa saja Kendala Yang dihadapi Kelompok Pemberdayaan Perempuan kepala keluarga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan di Kecamatan kelubagolit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana strategi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui program "PEKKA" di Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman peneliti.

b. Bagi Institusi Pendidikan

dapat menjadi rujukan sebagai sumber pengetahuan dan bacaan yang bermanfaat dalam pemberdayaan serta pengembangan masyarakat

c. Bagi PEKKA

Sebagai masukan dalam meningkatkan semangat juang perempuan dalam proses pemberdayaan ekonomi keluarga.